

ABSTRAK

HABIBI, NIM: 105261114120, Pandangan Masyarakat Kajang Tentang Denda Talak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dibimbing oleh: Pembimbing Pertama Dr. Muklis Bakri, Lc., MA, Pembimbing Kedua Ahmad Muntazar, Lc., S.H, M.Ag.

Tradisi denda talak telah menjadi bagian integral dari masyarakat Kajang, mencerminkan kompleksitas budaya dan struktur sosial mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi aspek budaya dan sosial dari praktik tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Temuan menunjukkan bahwa tradisi denda talak tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyelesaian konflik dalam pernikahan tetapi juga merepresentasikan norma sosial dan kekuatan budaya.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data yang bersifat empiris yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yaitu data yang bersifat normatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kajang memiliki denda yang mengatur pada perceraian, denda tersebut dapat dijatuhkan kepada pihak laki-laki dan juga pada perempuan tergantung siapa yang bersalah. Ada tiga jenis denda pertama cappa' ba'bala sebesar 6 juta rupiah, yang kedua adalah tangnga ba'bala sebesar 8 juta rupiah, dan yang ketiga adalah pokok ba'bala sebesar 12 juta rupiah. Dari hasil penelitian ini juga di peroleh bahwa masyarakat kajang sangat memegang teguh adat tradisi Denda Talak.

Kata Kunci: Tradisi, Pandangan Masyarakat, Denda

ABSTRACT

HABIBI, NIM: 105261114120, *Community Perspectives on Divorce Fines in Kajang Subdistrict, Bulukumba Regency.*

The tradition of divorce fines has become an integral part of the Kajang community, reflecting the complexity of their culture and social structure. In this context, this study explores the cultural and social aspects of this practice. Through a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and participatory observation. The findings show that the tradition of divorce fines not only functions as a conflict resolution system within marriage but also represents social norms and cultural power.

The data sources in this study are derived from both primary and secondary data. Primary data consist of empirical information directly obtained from informants through direct interviews, while secondary data are normative in nature. The methods used in this study include interviews and documentation.

The results of this study indicate that the Kajang community has established fines for divorce, which can be imposed on either the husband or the wife, depending on who is at fault. There are three types of fines: the first, *cappa' ba'bala*, amounts to IDR 6 million; the second, *tangnga ba'bala*, is IDR 8 million; and the third, *pokok ba'bala*, is IDR 12 million. The findings also reveal that the Kajang community strongly upholds the traditional practice of divorce fines.

Keywords: Tradition, Community Perspective, Divorce Fines.

